



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BALANGAN**

Jl.A.Yani Km. 4 Kec Kel. Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Balangan 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026 ini berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SOPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan daya saing, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan dasar di bidang PUPR; serta penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap penyedia jasa konstruksi di daerah.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini, maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setiap tahun sampai dengan tahun 2026 selama 5 (lima) tahun.

2026 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan sebaik-baiknya, maka swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Harapan kita semua tidak lain adalah *visi* pemerintah Kabupaten Balangan yaitu *Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera* menjadi kenyataan.

Paringin,

2021

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kab. Balangan**



[Handwritten Signature]

**RAHMADIAH, MT
PEMBINA / IVa
NIP.19760309 200604 2 007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan	50
4.2 Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
5.1 Strategi.....	53
5.2 Arah Kebijakan.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.1	Daftar Nominatif ASN dan THL Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.2	Daftar nominative Pejabat Berdasarkan Bidang Ilmu Yang dikuasai	15
Tabel 2.3	Target dan Realisasi Untuk Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	18
Tabel 2.4	Rincian Realisasi Untuk Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	18
Tabel 2.5	Target dan Realisasi untuk Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap	18
Tabel 2.6	Rincian Realisasi Untuk Persentase Irigasi dalam kondisi Mantap	19
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Untuk Persentase Jaringan Pipa Air Minum yang Berfungsi	19
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Untuk Persentase Prasarana MCK Yang Berfungsi	19
Tabel TC. 23 A	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPRPERKIM Kab. Balangan	23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan Oleh Dinas PUPRPERKIM	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan Periode Tahun 2021-2026	51
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan	52
Tabel 4.3	Hubungan antara Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Balangan	52

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan 2021 – 2026	55
Tabel TC. 27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas PUPRPERKIM	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026	73

BAB I

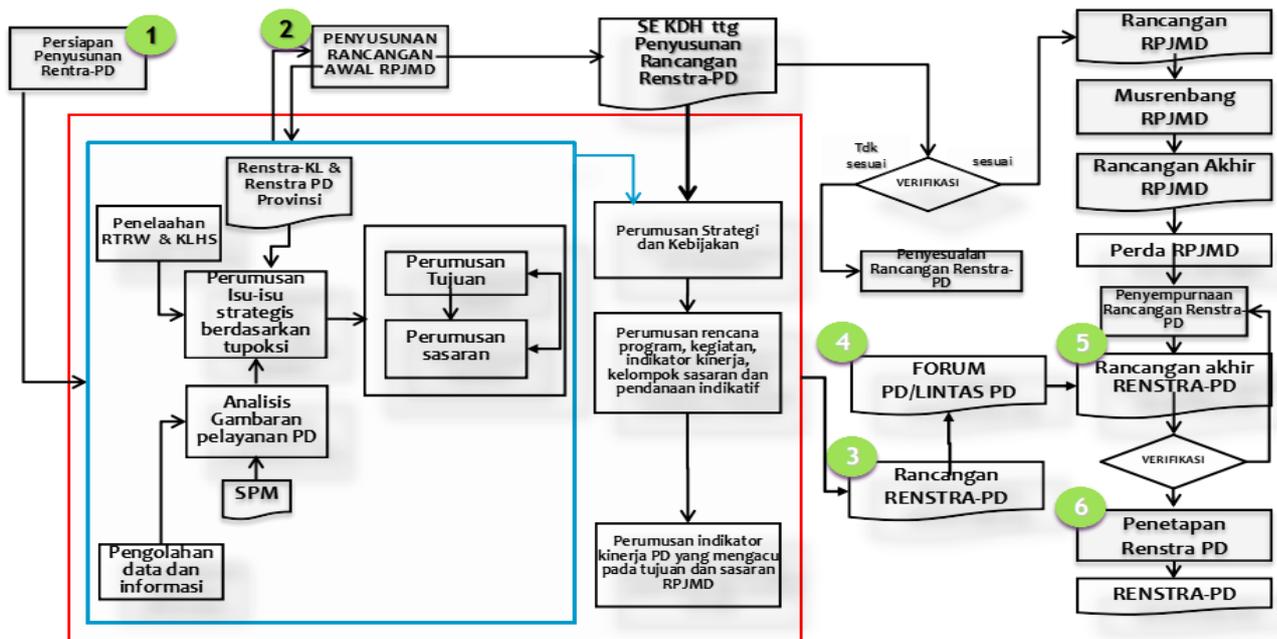
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Srategis Perangkat daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu :1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata cara Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Di sinilah peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 Kabupaten Balangan yaitu ***"Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera"***. Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan dan mengatasi persoalan kesenjangan antar wilayah kecamatan, mendukung produktifitas sektor pertanian dalam arti luas yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil.

Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.

Disamping itu, infrastruktur juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, pertambangan, perindustrian dan perdagangan agar roda perekonomian terus berputar. Pembangunan infrastruktur berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah.

Dengan demikian misi meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan & perkotaan dapat dirasakan serta dijalankan dengan 2 (dua) tujuan, yaitu Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan strategi dapat terlihat melalui:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak;
- c. Mengembangkan sistem pelayanan pusat-pusat kota secara hirarki dan merata.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, menghadirkan keuntungan sosial, meningkatkan layanan publik, serta meningkatkan partisipasi politik di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dalam rangka perwujudan dan pemantapan Kabupaten Balangan yang mandiri dan sejahtera

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan memuat tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setiap tahun mulai tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mensukseskan Misi Pemerintah Kabupaten untuk *"meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan & perkotaan"*.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026 ini, di samping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga berlandaskan pada kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, prioritas kabupaten dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256)
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, beserta ketentuan pelaksanaannya.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137)
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
 17. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271)

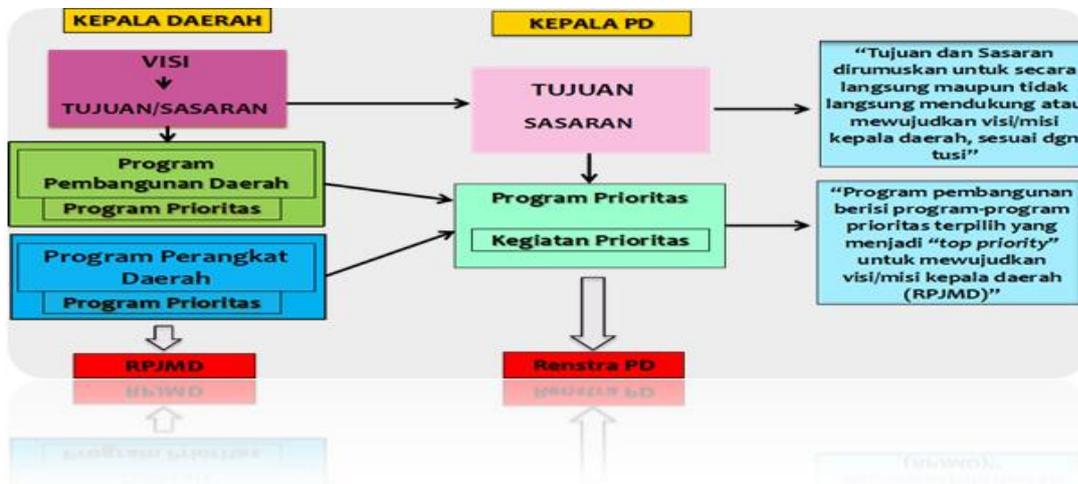
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

- Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
 26. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021)
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud untuk melakukan integrasi , sinkronisasi sinergitas dan penyalarsan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan kinerja dan program kegiatan serta sub kegiatan yang akan menjadi arah dan pedoman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan

mensukseskan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sebagaimana yang dituangkan pada gambar 1.2



Gambar 1.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

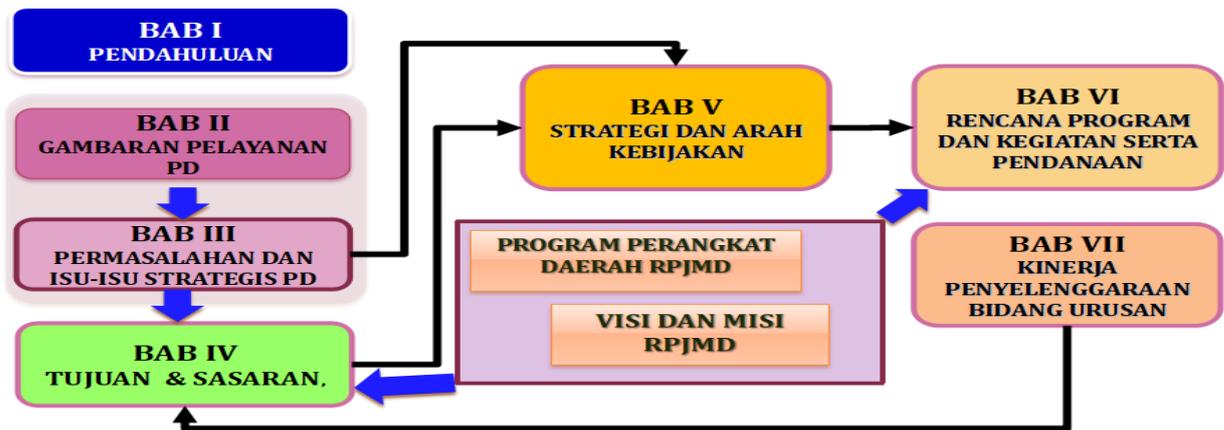
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah kedalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi,

kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu penulisan sistematika Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah kabupaten balangan nomor 25 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

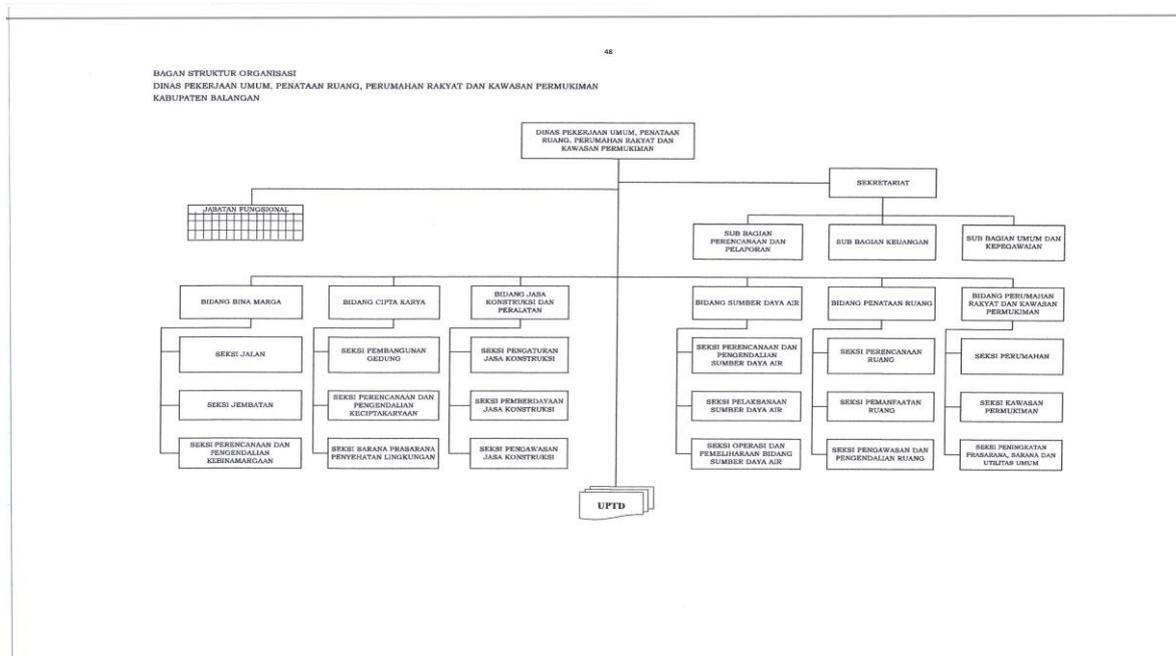
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sumber daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, serta tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.

Adapun uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijakan teknis Dinas;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Melaksanakan dan melakukan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Bina Marga;
- e. Melaksanakan dan melakukan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Cipta Karya;

- f. Melaksanakan dan melakukan pembinaan Jasa Konstruksi;
- g. Melaksanakan dan melakukan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Sumber Daya Air;
- h. Melaksanakan dan melakukan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Penataan Ruang;
- i. Melaksanakan dan melakukan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- j. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum;
- k. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kegiatan sebelumnya dari sumber data yang ada sebagai pedoman kerja;
- l. Mengoordinasikan kegiatan kerja para Kepala Bidang dan Sekretariat dalam rangka kelancaran tugas masing-masing;
- m. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya;
- n. Meneliti dan menyeleksi usulan kegiatan Kepala Bidang dan Sekretariat sebagai bahan pembuat kebijakan selanjutnya;
- o. Melakukan penelitian pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan maupun pelayanan administrasi/ketatausahaan;
- p. Memberi petunjuk dan pembinaan kepada para kepala bidang dan bagian pengawasan serta pengendalian dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Memantau pelaksanaan kegiatan kepala bidang dan sekretariat serta mengevaluasinya dalam tugas masing-masing;
- r. Melakukan pembinaan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan untuk pelaksanaan teknis;
- s. Mengelola kebijakan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan bupati dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dinas;
- t. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan ketatausahaan;
- u. Membuat laporan kegiatan dinas berdasarkan bahan laporan masing-masing unit kerja dan data yang ada untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan masukan; dan

- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan didukung oleh sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Aparatur, serta Sarana Prasarana Pendukung diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataa Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan berjumlah 132 orang, terdiri dari 56 orang (42%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 32 orang (57%) dan jumlah perempuan sebanyak 24 orang (43%) , serta 76 orang (58%) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 55 orang dan jumlah perempuan sebanyak 21 orang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Daftar Nominatif ASN dan THL Berdasarkan Jenis Kelamin

Tipe	Sekre		BINA MARGA		CIPTA KARYA		SDA		PENATAAN RUANG		JASKON		PERKIM		TOTAL		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TOT
ASN	2	4	5	3	6	3	5	2	5	2	5	4	4	6	32	24	56
THL	38	8	5	2	3	2	4	3	1	2	1	1	3	3	55	21	776
JML	41	12	10	5	9	5	9	5	5	5	6	4	7	9	87	45	132
TOTAL	53		15		14		14		10		10		16		132		

Tabel 2.2

Daftar Nominatif Pejabat berdasarkan Bidang Ilmu yang dikuasai

No	JABATAN	PENDIDIKAN-JURUSAN
1	Sekretaris	S2-Manajemen Rekayasa Konstruksi
2	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	S1-Ekonomi Akuntansi
3	Kasubbag Keuangan	S1-Administrasi Negara
4	Kasubbag Umum & Kepegawaian	S1-Manajemen
5	Kabid Bina Marga	S2-Magister Teknik
6	Kasi Jalan	S2-Magister Ilmu
7	Kasi Jembatan	S1-Teknik Sipil
8	Kasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamargaan	S1-Teknik Sipil
9	Kabid Cipta Karya	S1-Teknik Sipil
10	Kasi Pembangunan Gedung	S1-Planologi
11	Kasi Perencanaan & Pengendalian Keciptakaryaan	S1-Teknik Arsitektur
12	Kasi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan	S1-Teknik Sipil
13	Kabid Jasa Konstruksi dan Peralatan	S1-Teknik Sipil
14	Kasi Pengaturan Jasa Konstruksi	S1-Sosial Ekonomi
15	Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	S1-Teknik Arsitektur
16	Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi	S1-Teknik Sipil
17	Kabid Sumber Daya Air	S2-Teknik Sipil
18	Kasi Perencanaan & Pengendalian Sumber Daya Air	S1-Teknik Sipil
19	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	S2-Teknik Sipil
20	Kasi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	S1-Teknik Mesin
21	Kabid Penataan Ruang	S1-Teknik Sipil
22	Kasi Perencanaan Ruang	S1-Ekonomi
23	Kasi Pemanfaatan Ruang	S2-Magister Manajemen
24	Kasi Pengawasan & Pengendalian Ruang	S1-Teknik Geodesi

25	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	S2-Magister Teknik
26	Kasi Perumahan	S1-Administrasi Negara
27	Kasi Kawasan Permukiman	S1-Teknik Sipil
28	Kasi Peningkatan PSU	S1-Teknik Sipil Jurusan Pengairan

2.2.2 Saran dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat yang memadai dapat menampung 150 orang peserta dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang cukup memadai dalam mendukung kelancaran operasional kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti : Meubelair, Komputer dan Laptop, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, Fasilitas Telekomunikasi dan Internet, dan lain-lain
3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional, seperti Mobil Kepala Dinas, Mobil Operasional ,Kendaraan Dinas

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Perkerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Kabupaten Balangan berperan penting dalam mendukung peningkatan ekonomi perkotaan, Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2021 nama nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari 5 Bidang yaitu :

1. Bidang Bina Marga
2. Bidang Cipta Karya
3. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan
4. Bidang Sumber Daya air
5. Bidang Penataan Ruang

Pada awal bulan September 2021 menjadi perangkat daerah dengan nama nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipe A, yang terdiri dari 6 bidang yaitu :

1. Bidang Bina Marga
2. Bidang Cipta Karya
3. Bidang Sumber Daya Air
4. Bidang Penataan Ruang
5. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan
6. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2017 sampai bulan Agustus 2021 indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
- Persentase irigasi dalam kondisi mantap
- Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi
- Persentase prasarana MCK yang berfungsi
- Persentase jaringan drainase dalam keadaan baik

Berikut ini rincian capaian indikator sasaran untuk periode 2017-2020

- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
Transportasi jalan adalah merupakan salah satu sector yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan kualitas jaringan jalan adalah sasaran pertama pada urutan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari uraian program kegiatan pendukung untuk mencapai

sasaran persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap maka dapat dilihat perkembangan kondisi jalan dibawah ini :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi capaian tahun ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	30	32	35	38	37,81	40,32	44,51	48,30

Rincian realisasi indikator sasaran bidang ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Realisasi untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Realisasi capaian Tahun Ke			
	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100$	37,81	40,32	44,51	48,30
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	254.145 Km	271.026 Km	299.242 Km	324.722 km
Total panjang jalan kabupaten	672.253 km	672.253 km	672.253 km	672.253 km

Tabel 2.5
Target Dan Realisasi Untuk Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi capaian tahun ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Persentase irigasi dalam kondisi mantap	45,34	48	50	52	45,91	49,01	52,67	55,88

- Persentase irigasi dalam kondisi mantap

Tabel 2.6

Rincian Realisasi untuk Persentase irigasi dalam kondisi mantap

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Realisasi capaian Tahun Ke			
	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{Panjang irigasi dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang irigasi kabupaten}} \times 100$	45,91	49,01	52,67	55,88
Panjang irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	40.192	42.910	37.421	48.920
Total panjang irigasi kabupaten	87.546	87.546	71.046	87.546

- Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Untuk Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi capaian tahun ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi	88,85	91,63	94,41	97,19	83,23	94,76	95,45	80,59

- Persentase prasarana MCK yang berfungsi

Table 2.8

Target dan Realisasi Untuk Persentase prasarana MCK yang berfungsi

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi capaian tahun ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Persentase prasarana MCK yang berfungsi		89,44	92,96	96,48		79,41	80,45	95,09

Tabel TC. 23 A

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahunke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahunke-(=capaian/target x 100%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Wajib Pekerjaan Umum:																			
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	60	60		17	30	32	35	38	34,80	37,81	40,32	44,51	48,30	204,70	126,03	126	127,17	127,10
2	Persentase kinerja sistem irigasi	70	70		43	45,34	48	50	52	43,33	45,91	49,01	52,67	55,88	100,76	102,02	102,10	105,34	107,46
3	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	81,77	81,77		86,67	88,85	91,63	94,41	97,19	61,92	83,23	94,76	95,45	80,59	71,44	93,67	103,41	101,10	82,92
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																			
1	Rasio rumah layak huni	100	100			80,59	81,38	82,18	82,98			0	82,80	90,28			0	100,75	108,80
2	Persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	100	100			100	51	34	12		0	39,27	32	8,5		0	77	94	70
3	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	100					100	100				100	100				100	100

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada pelaksanaan Renstra sebelumnya periode tahun 2016-2021 capaian indikator kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan pencapaian realisasi yang sebagian besar telah melebihi 100%, namun indikator yang belum tercapai dari target yang ditentukan yaitu pada indikator persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh perkotaan. Maka pada periode Renstra selanjutnya hal ini akan menjadi perhatian yang untuk dituntaskan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja SKPD dari tahun 2016-2020 diantaranya :

1. Terbatasnya sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja yang ada
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka melaksanakan tugas
3. Koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan
4. Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik, dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sangat minim , diantaranya ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih.
5. Pelayanan jaringan air bersih masih sangat terbatas dengan tingkat pelayanan dan kualitas yang masih sangat terbatas.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia dengan dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang optimaldi Kabupaten Balangan
4. Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baik kabupaten.
5. Peningkatan / sosialisasi kepada masyarakat

Melaksanakan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kawasan perumahan/permukiman kumuh secara bertahap seperti ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jalan	168,912,479,900	96,425,786,000	77,002,503,000	92,100,893,900	74,609,973,300	161,641,354,920	91,255,758,180	74,782,956,550	88,392,206,627	71,267,973,315	95.70	94.64	97.12	95.97	95.52	434,441,662,800	430,325,870,940
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Irigasi	18,262,382,000	18,082,750,000	20,818,950,000	34,835,435,000	23,850,583,792	16,806,775,000	16,184,300,087	20,000,166,000	33,178,113,685	22,556,887,000	92.03	89.50	96.07	95.24	94.58	91,999,517,000	90,680,732,172
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	17,786,635,473	27,206,386,160	46,136,775,000	62,298,693,000	26,083,503,400	17,739,076,442	26,307,445,850	44,994,143,328	59,518,526,762	25,691,172,500	99.73	96.70	97.52	95.54	98.50	153,428,489,633	153,697,426,882
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		624.584.000	268.154.000	1.391.300.400	960.870.000		522.726.400	235.663.900	1.276.547.300	955.913.000		83,69	87,88	91,75	99,48	3.244.908.400	2.990.850.600
Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh		1.015.827.000	1.432.089.000	6.419.774.000	1.088.642.500		854.552.996	1.263.476.840	6.246.704.743	1.063.644.000		84,12	88,22	97,30	97,70	9.956.332.500	9.428.378.579

10-15 ha yang ditangani																	
Terpenuhi ya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat				470.500.000	302.270.000				409.512.000	288.769.000				87,04	95,53	772.770.000	698.281.000

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode pelaksanaan RENSTRA periode 2016-2021 struktur anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan disamping memiliki anggaran belanja juga sebagai perangkat daerah yang menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi lebih dari 100% dari pada target yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi belanja cukup baik, paling rendah 82%, yaitu pada belanja pegawai dan tertinggi 99 % pada realisasi belanja modal.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam melaksanakan urusannya disamping bersumber dari APBD murni juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK penugasan bidang jalan, bidang sumberdaya air, bidang air minum dan bidang sanitasi. Serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2020, realisasi belanja yang rendah, karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah :

- a. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian peningkatan jumlah penduduk harus terkelola dengan baik, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi merupakan tantangan yang harus diperhatikan dan harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.
- b. Rendahnya daya saing daerah karena kurangnya fasilitas wilayah/infrastruktur. Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas

wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Tahun 2015 - 2016 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Balangan sebesar 0,005 dan sebesar 0,004 di tahun 2017-2019. Nilai rasio panjang jalan tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan di Kabupaten Balangan masih mampu menampung jumlah kendaraan/arus barang dan jasa disektor perekonomian, namun masih perlu untuk ditingkatkan.

- c. Tingginya tuntutan masyarakat akan bangunan infrastruktur yang berkualitas.
- d. Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur
- e. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD.
- f. Rendahnya profesionalitas mitra kerja kontraktor.
- g. Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap kualitas bangunan infrastruktur

Sedangkan peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasannya adalah :

- a. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
- b. Tersedianya sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat
- c. Tersediannya forum SKPD untuk koordinasi
- d. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga terampil dan tersedianya sumber daya manusia dengan motivasi kerja yang tinggi.
- e. Adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Pada SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota

Adapun standar teknis tata cara pemenuhannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yaitu rumah tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dan Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pada pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Balangan yaitu :

- a. Akses air minum belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Balangan. Hal ini dapat diketahui dari data capaian pada tahun 2020 rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak baru mencapai 78,65%.
- b. Belum semua rumah tangga di Kabupaten Balangan mendapatkan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dapat diketahui dari data capaian pada tahun 2020 rumah tangga yang mendapatkan akses air limbah yang layak baru mencapai 91,88%

Penerima pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :

- a. Penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.

3.1.1 Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan

Jenis pelayanan yang biasa dilaksanakan di kabupaten Balangan adalah Jenis Pelayanan dasar Penyediaan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana yang dilaksanakan di daerah transmigrasi Lajar Papuyuan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong. Daerah ini merupakan daerah cekungan yang terendah bila musim hujan datang (banjir). Hal ini menyebabkan rapuhnya rumah masyarakat yang semuanya terbuat dari kayu. Total jumlah rumah yang masih dihuni di daerah tersebut terdapat 31 unit. Pada tahun 2020, dengan menggunakan dana APBD II Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 8 unit rumahsehingga di dapatkan capaian SPM sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
\text{Capaian SPM} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\% \\
&= 8/8 \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

Sedangkan jenis pelayanan yang kedua masih belum bisa dilaksanakan, selama ini rumah atau bangunan yang terkena program pemerintah, masyarakat lebih cenderung untuk diganti dengan uang dan membangun rumah dengan biaya sendiri dari uang pergantian tersebut.

Disamping melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang sumberdaya air, binamarga, ciptakarya, penataan ruang dan jasakonstruksi serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan tersebut antara lain :

a. Bidang sumberdaya air,

Permasalahan yang dihadapi bidang sumber daya air yaitu rendahnya kuantitas dan kualitas saluran pengairan dan irigasi, masih rendahnya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (21,53%) dan belum selesainya pembangunan jaringan irigasi bendungan pitap menjadikan pola tanam di kabupaten Balangan hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam setahun. Demikian pula dengan masih rendahnya infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 11,29%.

b. Bidang binamarga

Permasalahan yang dihadapi bidang binamarga yaitu rendahnya konektivitas wilayah dan antar wilayah yang dapat dilihat dari rendahnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan. Jalan yang menghubungkan wilayah dalam kabupaten dengan kondisi mantap tahun 2020 hanya 48,30% atau 324,722 km, sedangkan 74,390 km atau 11,06% kondisi rusak ringan dan 273,141 km atau 40,63% dalam kondisi

rusak berat. Sedangkan jalan (akses) yang menghubungkan antar wilayah kabupaten Balangan dengan kabupaten berbatasan (Paser, Kotabaru dan HST) masih belum terkoneksi, hal ini merupakan tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan kerjasama, pengembangan wilayah dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah serta persiapan mendukung rencana Ibu Kota Negara (IKN). Pengembangan konektivitas antar wilayah ini harus menjadi prioritas, karena apabila dapat terwujud maka kabupaten Balangan akan menjadi akses alternatif bagi daerah sekitar menuju ke Provinsi Kalimantan Timur maupun ke Kabupaten Kotabaru, khususnya yang berhubungan dengan transportasi laut.

c. Bidang cipta karya

Permasalahan yang dihadapi bidang cipta karya yaitu belum terpenuhinya bangunan gedung pemerintah, masih adanya gedung pemerintah yang menunjang pelayanan masyarakat yang belum selesai dibangun maupun belum terbangun hingga tahun 2020, yaitu bangunan gedung untuk kebutuhan pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan dan bangunan gedung perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah yang meliputi pertahanan keamanan dan peradilan.

d. Bidang Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi bidang penataan ruang yaitu belum optimalnya penataan dan pemanfaatan ruang, wajah kota Balangan yang belum terbentuk dari sejak berdirinya kabupaten Balangan hingga saat ini menjadikan kabupaten Balangan seakan belum memiliki entitas sebagai ibukota kabupaten. Penataan kota yang belum optimal hingga saat ini merupakan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dengan perencanaan yang matang, agar dapat menjadikan acuan dalam pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penataan kota Paringin sebagai ibukota kabupaten Balangan perlu dilaksanakan guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas. Keberadaan sungai yang melintasi kabupaten Balangan merupakan sebuah asset apabila dimanfaatkan secara optimal.

Pada aspek tata ruang, penegakan tata ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan belum optimal, hal ini disebabkan

kurangnya ketersediaan informasi rencana detail tata ruang (RDTR) di seluruh kecamatan dan masih rendahnya pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Balangan.

e. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan dan kawasan permukiman (air bersih layak, sanitasi aman, prasarana sarana utilitas umum perumahan, pengelolaan persampahan, kawasan kumuh) dan masih tingginya rumah tidak layak huni.

Akses air bersih layak pada tahun 2020 baru mencapai 78,65% yang terdiri dari jaringan perpipaan (PDAM dan Pamsimas) dan non jaringan perpipaan, kondisi ini disebabkan masih belum optimalnya jaringan pipa distribusi PDAM yang menyebabkan tingginya idle capacity di beberapa wilayah kecamatan serta kurangnya kesadaran dan kemampuan financial masyarakat dalam penggunaan air bersih yang aman bagi kesehatan.

Permasalahan sanitasi adalah masih adanya masyarakat kabupaten Balangan yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) yaitu sebesar 4,51% atau 5.719 jiwa dan masih rendahnya akses sanitasi aman yaitu hanya 0,49%. Meskipun persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah dasar dan layak mencapai 91,88%, namun tangka septiknya masih dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Peningkatan kualitas akses air limbah aman ini dapat dicapai dengan peningkatan penggunaan septiptank kedap (sesuai standar) seta penyedotan lumpur tinja secara terjadual untuk diolah di instansi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Belum terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman (84%) seperti jalan, drainase, persampahan dan penerangan jalan. Disamping itu masih adanya permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang perlu ditangani, pada tahun 2020 ini muncul lagi kawasan kumuh baru yang meliputi 8 (delapan) lokasi di 3 (tiga) wilayah kecamatan dengan luas 12,354 ha (SK kumuh tahun 2020), meskipun tidak luas namun perlu kegiatan penanganan serius agar tidak muncul kawasan kumuh baru lainnya. Pada

umumnya permasalahan dikawasan kumuh permasalahan permukiman kumuh di kabupaten Balangan adalah tidak tersedianya sarana sanitasi yang memadai, kualitas jalan lingkungan dan drainase yang kurang baik, serta kualitas dan jarak antar rumah yang sangat rapat dan tidak teratur sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut.

Belum optimalnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik dikawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh, pada tahun 2020 terdata 4.231 unit rumah tidak layak huni atau 9,72% dari 39.896 total unit rumah yang ada di Kabupaten Balangan, hal ini merupakan tantangan yang cukup berat karena membutuhkan alokasi pendanaan yang cukup besar. Selanjutnya permasalahan kualitas perumahan dan permukiman adalah pengelolaan persampahan, hingga tahun 2020 penanganan sampah mencapai 69,90% sedangkan pengurangan sampah masih sangat rendah yaitu hanya 2,65%. Kondisi ini karena dimasa pandemi covid – 19, seluruh bank sampah yang ada tidak berfungsi secara optimal dan juga masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk menerapkan metode reduce reuse, recycle dalam mengurangi volume sampah serta masih kurangnya SDM dalam pengelolaan persampahan.

f. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Kualitas hasil pekerjaan konstruksi salah satunya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia. Namun pekerja terampil konstruksi yang bersertifikat pada tahun 2020 baru mencapai 34,60% dan tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan pelatihan dan pensertifikatan atas pekerja terampil konstruksi tidak bisa dilaksanakan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Balangan	Rendahnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
		Belum optimalnya penataan wajah kota
		Belum optimalnya penegakan tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan
		Rendahnya pembangunan dan peningkatan kualitas saluran pengairan dan irigasi
		Belum terpenuhinya bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan
	Rendahnya kuantitas dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Rendahnya akses sanitasi aman
		Akses terhadap air bersih masih dibawah 80%
		Masih terdapat kawasan permukiman kumuh
		Belum terpenuhinya PSU perumahan
		Masih terdapat rumah tidak layak huni

Secara garis besar Isu strategis dari bidang infrastruktur adalah **Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah** di Kabupaten Balangan. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infrastruktur yang baik, sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan nyaman, serta peningkatan kualitas penyediaan pelayanan infrastruktur dasar untuk perumahan seperti akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi dasar.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021, yang didalamnya dijabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

3.2.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Balangan untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

“Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera”.

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut :

Maju : Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang

lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Sejahtera : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi : sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman serta didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-

perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

3.2.2 Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Balangan dalam segala bidang guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Balangan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pencapaian misi kesatu yaitu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan konektivitas jalan menuju pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi, memperluas jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat dan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi bagi

rumah tangga serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat baik dikawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh, juga melakukan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan juga melakukan penanganan terhadap kawasan kumuh perkotaan yang ada di Kabupaten Balangan.

3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah lima (5) tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Pembangunan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menjalankan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan dan ditampilkan pada tabel 3.1 yakni :

Tabel 3.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

MISI I	Meningkatkan dan Mengembangkan infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah sebagai pendukung dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan antara lain dalam program Penyelenggaraan Jalan. Disamping itu dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan Istana Anak Yatim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah utama sebagai pelaksana program tersebut.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Umum dan Tata Ruang Tahun 2020-2024, Kementrian PUPR mempunyai visi yaitu: “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.*

Permasalahan dan isu strategis Kementrian PUPR tahun 2020- 2024, yaitu:

1. Pengelolaan Sumber daya Air

Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih. Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m³ dari target 14,7 miliar m³ pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%. Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara online dan real time. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi

2. Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan sebagai modal utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%,

sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air

3. Pembinaan Jasa Konstruksi

Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi, Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN

Penyediaan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Balangan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian, melalui penyediaan jaringan irigasi yang memadai, disamping itu ketersediaan tampungan air dan kelestarian sungai sangat vital sebagai sumber bahan baku penyediaan air bersih bagi rumah tangga yang merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi, mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi bagi

daya saing daerah, mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia yang baik.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Dinas PUPR Kalimantan Selatan juga harus meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, dimana setara dapat dilihat dari akses, kontrol/kewenangan, dan kesempatan berpartisipasi sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Upaya ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai PUPR. Disamping itu khususnya infrastruktur PUPR dapat dimanfaatkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (special needs) seperti lansia, anak-anak, dan difable. Selanjutnya beberapa isu strategis dan permasalahan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, yang terkait dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Balangan, diuraikan berikut ini :

a. Sumber daya air

Mendukung penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.

b. Bina Marga

Transportasi arus barang dan jasa serta orang antar wilayah dan antar titik pertumbuhan yang perlu dioptimalkan lagi dengan peningkatan di berbagai jalan provinsi dan strategis provinsi. Meningkatkan keluasan jangkauan dan kemampuan jaringan jalan dalam melayani arus lalu lintas barang dan penumpang antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengembangan jaringan jalan melihat dari potensi ekonomi, daerah perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian dan wisata yang belum terakomodir. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar kabupaten/kota dan provinsi.

c. CiptaKarya.

Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga perlu peningkatan sinkronisasi dan fasilitasi melalui kegiatan koordinasi dan bantuan perbaikan prasarana. Belum optimalnya

pembangunan fasilitas publik di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan fasilitas prasana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang berstandar dan layak dan prasarana lingkungan lainnya.

d. Penataan Ruang dan Pertanahan

Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang, sebagai unit kerja pengendali tata ruang provinsi masih belum bisa mengoptimalkan keselarasan antara tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif. Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

e. Bina Konstruksi

Masih belum optimalnya peranan kompetensi laboratorium pengujian konstruksi, Masih terbatasnya penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi yang adaptif terhadap potensi lokal kalsel, masih rendahnya pengembangan dan pelayanan informasi teknologi dan konstruksi.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Untuk memperoleh rencana strategis perangkat daerah yang komprehensif perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Provinsi Kalimantan Selatan maupun RTRW Kabupaten Balangan, sehingga rencana strategis perangkat daerah sejalan dengan RTRW serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Balangan.

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015. Adapun kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah Barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah Timur dengan wilayah Tenggara Daerah ;

- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
- c. Peningkatan perlindungan Kawasan Lindung;
- d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung;
- e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional ; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Adapun RTRW Kabupaten Balangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan tata Wilayah Kabupaten Balangan. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Balangan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama

4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan meliputi :

1. Pengembangan system agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana
4. Pengembangan kawasan strategis kabupaten
5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Sehubungan dengan perkembangan kebijakan pembangunan daerah, sehingga terjadi perubahan pemanfaatn ruang maka perlu dilakukannya peninjauan kembali atas rencana tata ruang Kabupaten Balangan.

3.4.2 Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa

mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta

menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di atas, yang berkesesuaian dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan dapat di tarik sebagai isu strategis adalah tujuan no 6 dan no 9, yakni : menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua ; serta membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu Pembangunan Kabupaten Balangan tidak terlepas dari isu-isu pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan tingkat nasional provinsi, rencana tata ruang wilayah dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta memperhatikan dampak dari pandemic covid-19 yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Bina Marga

Belum mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten sebagai prasarana transportasi dalam melayani arus lalu lintas barang dan orang yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar Kecamatan dan Desa.

b. Bidang Sumber Daya Air

Penyediaan air baku belum seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat. Disamping itu seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan pangan maka diperlukan peningkatan bahan pangan, maka perlu tersedianya saluran irigasi yang berfungsi baik untuk peningkatan produksi pertanian.

c. Bidang Cipta Karya

Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di wilayah Kabupaten Balangan sehingga perlu pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Balangan yang merupakan fasilitas parasana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana publik lainnya.

d. Bidang Penataan Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang, sebagai unit kerja pengendali tata ruang kabupaten belum bisa mengoptimalkan agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif. Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Disamping itu sebagai Pembina jasa konstruksi belum mampu menyediakan tenaga terampil konstruksi yang cukup dan bersertifikat untuk penyedia pekerjaan konstruksi.

e. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan dan kawasan permukiman (air bersih layak, sanitasi aman, prasarana sarana utilitas umum perumahan, pengelolaan persampahan, kawasan kumuh) dan masih tingginya rumah tidak layak huni.

Berdasarkan identifikasi permasalahan- permasalahan dan hasil telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, maka isu strategis yang berkembang di lingkup perangkat daerah, berdasarkan isu strategis yang diambil berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Balangan Yaitu :

“ Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan “

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026-.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Balangan, yakni :“ **Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan**”.

Berdasarkan isu strategis yang ditetapkan, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan memiliki 2 (dua) tujuan adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik “

Dan

“ Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman”

Matriks Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan 2021-2026.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan periode Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	30,52	32,79	34,84	36,79	38,75	40,21
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	22,32	22,85	23,32	23,88	24,35	24,71

4.2 Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman

Berikut ini Tabel rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	30,52	32,79	34,84	36,79	38,75	40,21
	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	22,32	22,85	23,32	23,88	24,35	24,71

Tabel 4.3
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Sasaran RPJMD	Tujuan RPJMD
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman		

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan dengan melihat kondisi internal dan eksternal disusun dengan memadukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Dalam analisis SWOT menggunakan hasil telaahan isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini

INTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana peralatan kantor 2. Ketersediaan aparatur 3. Adanya Peraturan perundang-udangan bidang ke PU an dan Perumahan Rakyat 4. Tersedianya anggaran dalam APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana prasarana 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai 3. Belum tersedianya system informasi database infrastruktur
EKSTERNAL	Opportunities (Kesempatan)	Threats (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui DAK dan program lainnya 2. Tersedianya proses PBJ secara elektronik 3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infra struktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya wabah virus corona 2. Kondisi alam yang menghambat pekerjaan konstruksi khususnya di wilayah air 3. Bencana alam yang berpotensi merusak infrastruktur.

Gambar 5.1 Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Analisis SWOT

Strategi juga merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Adapun strategi yang digunakan antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
3. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
4. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Meningkatkan penataan bangunan gedung demi kelayakan bangunan
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan system air limbah
8. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
9. Meningkatkan luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani
10. Meningkatkan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan pada periode 2021-2026 merupakan cara untuk mencapai strategi yang telah ditentukan, dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu arah kebijakan, dengan total 15 arah kebijakan. Berikut beberapa arah kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan
2. Melakukan pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang belum terhubung dengan jaringan jalan
3. Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sistem air limbah

7. Meningkatkan pelayanan infrastruktur drainase
8. Meningkatkan kualitas bangunan publik yang layak pakai
9. Percepatan penyelesaian norma, standar, prosedur dan kriteria tentang rencana tata ruang wilayah
10. Penyediaan dan pembangunan RTH publik
11. Meningkatkan informasi terhadap layanan jasa konstruksi
12. Peningkatan penanganan rumah layak huni bagi korban bencana
13. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
14. Peningkatan penanganan kawasan kumuh
15. Peningkatan kualitas PSU perumahan

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
2021-2026**

Visi	Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera
Misi I	Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan
					Meningkatkan penataan bangunan dan	Melakukan pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang belum terhubung dengan jaringan jalan
					Meningkatkan penataan bangunan dan	Meningkatkan kualitas bangunan publik yang layak pakai

					lingkungan	
					Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Percepatan penyelesaian norma, standar, prosedur dan kriteria tentang rencana tata ruang wilayah
						Penyediaan dan pembangunan RTH publik
					Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi
						Meningkatkan pelayanan infrastruktur drainase
					Meningkatkan penataan bangunan gedung demi kelayakan bangunan	Meningkatkan kualitas bangunan publik yang layak pakai
					Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum
					Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan system air limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sistem air limbah
	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
						Peningkatan penanganan rumah layak huni bagi

	r permukiman	permukiman		permukiman		korban bencana
					Meningkatkan luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani	Peningkatan penanganan kawasan kumuh
					Meningkatkan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	Peningkatan kualitas PSU perumahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD, Pemerintah Daerah maupun Pusat. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
5. Program pengembangan permukiman
6. Program penataan bangunan gedung
7. Program penataan bangunan dan lingkungannya
8. Program penyelenggaraan jalan
9. Program pengembangan jasa konstruksi
10. Program penyelenggaraan penataan ruang
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
13. Program Kawasan Permukiman
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Secara lebih lengkap dan terperinci, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan selama lima tahun beserta pagu indikatif pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel TC. 27

Tabel T-C. 27.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Balangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									-		-								145.851.459.604	935.926.237.970				
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			178.848.365.529,72		201.938.869.322	-	180.168.668.575		177.810.767.433		172.742.444.176		144.603.707.904		916.275.387.048	PUPR	Kab. Balangan	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			155.506.934.529,72		183.746.924.872,00		159.955.309.680,00		155.576.072.648,00		148.284.279.912,80		144.603.707.904		916.275.387.048	PUPR	Kab. Balangan	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	64,61	65	4.134.658.570	65,50	11.259.712.656	66	17.986.429.680	67	15.112.072.648	69	15.460.279.913	70	17.943.307.904	70	77.396.461.371	SEKRETARIAT	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1	03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2	3	60.000.000	2	25.360.000	2	127.896.000	2	130.685.600	2	133.754.160	2	137.129.576	15	614.825.336		Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2	3	60.000.000	2	25.360.000	2	27.896.000	2	30.685.600	2	33.754.160	2	37.129.576	15	214.825.336		Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan		12	-	12	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	200.000.000		Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	1	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		12	-	12	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	200.000.000		Kab. Balangan

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14	14	2.851.094.580	14	7.821.869.756	14	8.648.552.490	14	9.508.407.739	14	10.454.248.513	14	11.494.673.364	14	50.778.846.442	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	14	14	2.798.814.580	14	7.666.365.900	14	8.433.002.490	14	9.276.302.739	14	10.203.933.013	14	11.224.326.314	14	49.602.745.036	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.02.03	Peleksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencarian anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	-	12	5.003.856	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	205.003.856	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	3	5	52.280.000	3	150.500.000	3	165.550.000	3	182.105.000	3	200.315.500	3	220.347.050	23	971.097.550	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	-	12	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	200.000.000	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.03.06	Peratausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	-	12	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	200.000.000	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	104.920.000	100%	405.713.000	100%	432.534.300	100%	464.787.730	100%	500.266.503	100%	539.293.153	100%	2.447.514.686	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang didakan	100	100	-	150	112.500.000	110	110.000.000	110	110.000.000	110	110.000.000	110	110.000.000	790	552.500.000	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23	23	104.920.000	50	293.213.000	50	322.534.300	50	354.787.730	50	390.266.503	50	429.293.153	296	1.895.014.686	Kab. Balangan

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	12	12	583.179.000	12	1.336.411.600	12	1.520.052.760	12	1.667.058.036	12	1.828.763.840	12	2.006.640.224	12	8.942.105.459	Kab. Balangan	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	3	64.210.000	3	8.450.000	3	9.295.000	3	10.224.500	3	11.246.950	3	12.371.645	21	115.798.095	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	12	12	46.163.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	58.564.000	12	64.420.400	12	314.787.400	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12	46.050.000	12	288.911.600	12	317.802.760	12	349.583.036	12	384.541.340	12	422.995.474	12	1.809.884.209	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	12	10.400.000	12	12.000.000	12	13.200.000	12	14.520.000	12	15.972.000	12	17.569.200	12	83.661.200	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	12	416.356.000	12	983.050.000	12	1.081.355.000	12	1.189.490.500	12	1.308.439.550	12	1.439.283.505	12	6.417.974.555	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.06	10	Peratuausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang menjadi bahan informasi		12	-	12	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	200.000.000	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	100%	100%	-	100%	-	100%	5.370.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	1.680.000.000	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	11	16	-	16	-	3	670.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	52	880.000.000	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang diadakan		2	-	2	-	2	4.500.000.000						4		Kab. Balangan	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SKKP SKPD	1	03	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan		1	-	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	800.000.000	Kab. Balangan

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100%	100%	309.919.990	100%	982.638.800	100%	1.080.902.680	100%	1.188.992.948	100%	1.307.892.243	100%	1.438.681.467	100%	6.309.028.128	Kab. Balangan	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	224.000.000	12	610.800.000	12	671.880.000	12	739.068.000	12	812.974.800	12	894.272.280	12	3.952.995.080	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi	12	12	85.919.990	12	371.838.800	12	409.022.680	12	449.924.948	12	494.917.443	12	544.409.187	12	2.356.033.048	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100%	100%	225.545.000	100%	687.719.500	100%	756.491.450	100%	1.832.140.595	100%	915.354.655	100%	2.006.890.120	100%	6.424.141.319	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	12	142.800.000	12	407.630.000	12	448.393.000	12	493.232.300	12	542.555.530	12	596.811.083	12	2.631.421.913	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.09	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	12	17.000.000	12	51.500.000	12	56.650.000	12	62.315.000	12	68.546.500	12	75.401.150	12	331.412.650	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala		1				1	1.000.000.000		1	1.000.000.000	3	2.000.000.000			Kab. Balangan	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur ke Pekerjaan Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nisi SAKIP-SOPD	1	03	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	65.745.000	5	228.589.500	5	251.448.450	5	276.593.295	5	304.252.625	5	334.677.887	26	1.461.306.756	Kab. Balangan

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	10%	27%	462.802.272	42%	1.000.000.000	56%	5.350.000.000	75%	5.750.000.000	89%	5.950.000.000	100%	5.400.000.000	100%	28.748.959.816	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	10	1	459.802.272	9	400.000.000	11	2.600.000.000	12	2.900.000.000	12	3.100.000.000	9	2.500.000.000	64	14.367.110.316	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	01	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen rencana teknis kawasan	0	0	-	1	-	1	500.000.000	1	500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	7	3.500.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun	3	1	459.802.272	3	400.000.000	1	500.000.000	2	800.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	12	4.267.110.316	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	03	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah bahan substansi penetapan rtr yang tersusun	7	0	-	3	-	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000	4	800.000.000	35	5.600.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah substansi sosialisasi	0	0	-	2	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi perencanaan tata ruang	0	0	-	3	-	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	19	1.900.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	0	0	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	0	0	-	1	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	9	900.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	01	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah substansi konsultasi publik	0	0	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	2	2	3.000.000	4	200.000.000	3	650.000.000	3	750.000.000	3	800.000.000	3	850.000.000	20	3.986.210.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	0	0	-	1	-	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	5	1.950.000.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan umum yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah bahan informasi penataan ruang	2	2	3.000.000	3	200.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	15	2.036.210.000	Bidang TATA RUANG	Kab. Balangan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan selang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	48,30	55,48	66,07	73,67	79,31	85,24	88,47	88,47
2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	76,90	78,42	80,06	82,08	84,61	87,39	90,17	90,17
3	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik	21,53	23,09	24,20	28,31	34,55	39,24	44,39	44,39
4	Persentase panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah dalam kondisi baik	11,29	11,79	12,41	13,03	13,65	14,27	14,90	14,90
5	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang	78,65	81,27	82,27	83,27	84,27	85,27	86,27	86,27

	layak								
6	Persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah domestik	91,88	92,40	92,75	93,76	94,76	95,76	96,76	96,76
7	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,27	89,38	89,49	89,60	89,71	89,82	89,93	89,93
8	Jumlah Bangunan yang ditata	0	0	1	1	1	1	1	5
9	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,28	0	95	95	96	96	97	97
10	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	10	27	42	56	75	89	100	100
11	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	71,40	74,08	78,49	84,78	91,71	98,00	100	100
12	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84	85	85	87	89	91	93	93

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, merupakan acuan penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran-sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dengan beberapa dinas dan instansi terkait. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar bisa berdayaguna dan berhasil guna serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan infrastruktur di daerah juga perlu dilandasi dengan kerangka peraturan dan regulasi yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Untuk kelancaran dan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan di dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan membutuhkan tidak sedikit pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka diperlukan juga kemitraan pemerintah dan swasta. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi yang lebih terbuka dan sehat antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif dan terbuka.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat ikut mensukseskan Visi dan Misi Bupati Balangan terpilih dalam rangka mewujudkan Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera.

Paringin,

2021

**Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kab. Balangan**

